PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KHAIRIL FAJRI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **199673**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 589.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BT3 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
5. MOTOR, YAMAHA B6H A/T /SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RODA DUA MX KING Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
7. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 36.450.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 30.000.000**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.105.450.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**651.971.129**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**453.478.871**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.